

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai merupakan bagian dari suatu tatanan Pemerintahan di Kota Binjai yang mempunyai peranan membantu Kepala Daerah dalam Pembangunan di bidang Sosial dan Ketenagakerjaan, bertindak mewakili kepentingan seluruh masyarakat, sehingga dalam menjalankan peranan tersebut, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Dukungan untuk bisa menerapkan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas yang dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar.

Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan adanya sistem yang digunakan untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah ini diharapkan bias mengubah paradigma instansi pemerintah, yang semula hanya berorientasi pada uang (*input oriented*) menjadi orientasi pada hasil (*result oriented*) serta dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan out put maupun perbaikan terhadap

sistem dan prosedur yang ada. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.

B. GAMBARAN UMUM

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Binjai. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 113 Binjai 20743.

Berikut ini adalah struktur organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Program.
3. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - b. Seksi Pemulihan dan Advokasi Sosial;
 - c. Seksi Pengembangan dan Kepahlawanan.
4. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - b. Seksi Sumbangan Sosial dan Kebutuhan Dasar;
 - c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
5. Bidang Sumber dan Potensi Lembaga Sosial, terdiri dari:
 - a. Seksi Organisasi dan Karang Taruna;
 - b. Seksi PSM dan WKSBM;
 - c. Seksi Penyuluhan Sosial
6. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a. Seksi Penempatan dan Informasi Pasar Kerja;
 - b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemagangan;
 - c. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Sertifikasi Lembaga Latihan Kerja.
7. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perselisihan HI dan Pembinaan Organisasi Pekerja dan Pengusaha;
 - b. Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Keselamatan Kesehatan Kerja;
 - c. Seksi Persyaratan Kerja dan Jamsostek.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas dan fungsi yang diemban Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai No. 24 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai, yang mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Ketenagakerjaan berdasarkan azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, maka untuk mewujudkan tugas pokok tersebut maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan pelayanan ketenagakerjaan dengan mengedepankan efektifitas dan efesiensi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
2. Melaksanakan penyelenggaraan di bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan sebagai bentuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaksanakan penyelenggaraan di bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan dalam bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

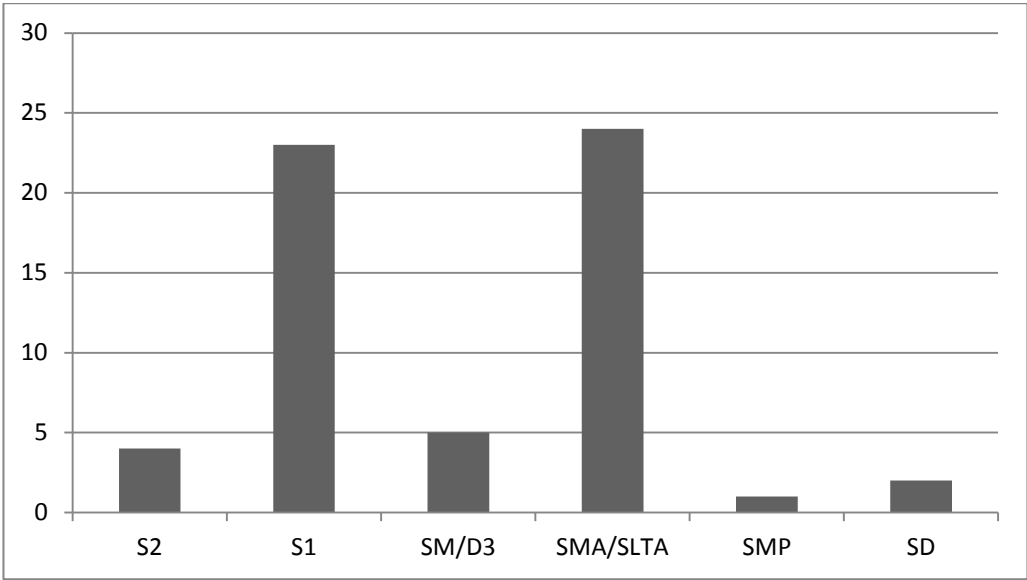
D. KEADAAN PEGAWAI

Jumlah Pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 60 Orang yang terdiri dari 49 Orang PNS dan 11 Orang Pegawai Non PNS, dengan Pembagian Golongan sbb :

- Golongan IV : 13 Orang.
- Golongan III : 28 Orang.
- Golongan II : 6 Orang.
- Golongan I : 2 Orang.
- Non Gol. : 11 Orang.

Sedangkan kondisi pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai menurut pendidikan yang dimiliki sebagai berikut:

- S2 : 3 Orang.
- S1 : 26 Orang.
- SM/D3 : 5 Orang
- SMA/SLTA : 23 Orang.
- SLTP : 1 Orang.
- SD : 2 Orang.



Grafik 1.1

Jumlah Pegawai Dinsosnaker Kota Binjai Menurut Pendidikan

E. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Lokasi kantor Badan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang berada di luar kompleks Pemerintahan Kota Binjai berpengaruh terhadap volume kebutuhan barang dan jasa yang digunakan. Barang dan jasa yang diperlukan meliputi penggunaan untuk operasional kegiatan dan pemeliharaan sarana yang dimiliki. Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kepada masyarakat. Nilai aset yang dikelola Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.715.425.769,- yang berupa Aset Tetap dan Rp. 86.301.000,- berupa Aset Lainnya. Sarana dan prasarana yang dikelola per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Dinsosnaker Kota Binja Tahun 2016

No	Sarana dan Prasarana	Nilai Aset
I.	ASET TETAP	3.541.782.372,-
1	Tanah	256.000.000,-
2	Peralatan dan Mesin	1.555.869.883,-
3	Gedung dan Bangunan	3.041.669.000,-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	164.573.880,-
5	Aset Tetap Lainnya	4.500.000,-
6	Akumulasi Penyusutan	(1.307.186.994,-)
II.	ASET LAINNYA	86.301.000,-
1	Aset Lain-lain	86.301.000,-

F. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

1. Aspek Strategis

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai berusaha mengimplementasikan tugas yang telah dipercayakan Kepala

Daerah dalam hal ini Walikota Binjai untuk dapat melayani di Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan.

a. Bidang Sosial

Aspek Strategis dalam bidang Sosial yang harus dicapai terutama dalam hal pemberdayaan Masyarakat Miskin, Wanita Rawan Sosial dengan memberikan bantuan bagi dalam hal berusaha begitu pula bantuan pangan bagi Korban Bencana Alam, Bantuan Pangan bagi 2 Panti Asuhan (*Al Jamiatul Wasliyah dan Nahdatul Islam*), Pemberdayaan dan Pemberian Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Penguatan Organisasi Sosial, Pembinaan Sosial bagi Anak jalanan, Melaksanakan Razia bagi Anak Sekolah, PSK begitu juga Gepeng, Pembinaan kepada Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (*WKSBM*), melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi TAGANA, Pekerja Sosial Masyarakat (*PSM*), Melaksanakan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (*PKH*) dan memberikan bantuan transport bagi Pendamping PKH yang telah dinyatakan lulus seleksi oleh Kementerian Sosial

b. Bidang Ketenagakerjaan

Aspek Strategis dalam bidang Ketenagakerjaan fokus dalam bagaimana mempersiapkan Pencari kerja ataupun masyarakat yang berminat berwira usaha dengan melaksanakan Pelatihan-pelatihan Tata Rias, Pembuatan Kue kering dan basah, Makanan Ringan, Menjahit, Tenun, Pangkas Pria begitu juga berusaha memberikan informasi pasar kerja bagi pencari kerja dan memberangkatkan Peserta Magang ke PT. Panasonic di Jakarta.

Data Angkatan Kerja yang terdaftar pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Penduduk Berumur 15 Tahun keatas menurut jenis Kegiatan Utama

Jenis Kegiatan Utama	2014	2015	2016
<i>Angkatan Kerja</i>	<i>107.736</i>	<i>111.287</i>	<i>120.311</i>
Bekerja	97.179	103.682	111.172
Pengangguran	10.557	7.605	9.139
<i>Bukan Angkatan Kerja</i>	<i>63.840</i>	<i>68.971</i>	<i>68.113</i>
Sekolah	19.730	21.036	21.244
Mengurus Rumah Tangga	35.880	36.056	39.365
Lainnya	8.230	10.879	7.504
Jumlah	171.576	180.258	188.424
<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</i>	<i>62,79</i>	<i>61,74</i>	<i>63,85</i>
<i>Tingkat Pengangguran</i>	<i>9,80</i>	<i>6,85</i>	<i>7,60</i>

2. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	4.800	914	5.714
Pertambangan dan Penggalian	508	-	508
Industri	6.209	3.752	9.961
Listrik, Gas dan Air Minum	602	-	602
Konstruksi	15.494	323	15.817
Perdagangan Besar, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	18.579	17.396	35.975
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	9.959	528	10.487
Lembaga Keuangan, Usaha Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	3.402	798	4.200
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	12.720	15.188	27.908
Total	72.273	38.899	111.172

3. Jumlah Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SD Kebawah	1.978	323	2.301
SMP	1.025	323	1.348
SMA	2.128	1.542	3.670
SMK	457	446	903
Diploma I/II/III	-	-	-
Akademi/Universitas	330	587	917
Jumlah	5.918	3.221	9.139

4. Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SD Kebawah	5.848	2.378	8.226
SMP	8.960	7.301	16.261
SMA	8.025	4.977	13.002
SMK	13.370	5.286	18.656
Diploma I/II/III	8.831	5.349	14.180
Akademi/Universitas	9.231	5.128	14.359
Jumlah	78.191	42.120	120.311

Dalam hal penegakan Hukum di Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai telah mempunyai 4 Orang aparat Pengawas Ketenagakerjaan yang mana 2 orang diantaranya telah mempunyai sertifikasi PPNS Ketenagakerjaan, 1 Orang aparat Mediator yang telah mempunyai sertifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2016 yaitu : Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Dewan Pengupahan.

Untuk mendapatkan kepastian Hukum terutama dalam bidang ketenagakerjaan bagi Pengusaha dan Pekerja maka secara rutin melakukan Pengawasan ke

Perusahaan dan menindaklanjuti laporan Pekerja dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (*PHK*), begitu juga dalam hal Penetapan Upah Minimum Kota (*UMK*) Binjai untuk Tahun 2017, Tim Dewan Pengupahan berusaha menetapkan Upah sesuai dengan keadaan di Kota Binjai dengan melakukan survey ke Pasar dan Kelurahan dengan mempertimbangkan tingkat inflasi pada tahun 2016 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015. Berikut kami sajikan perkembangan Upah Minimum Kota Binjai.

Tahun	UMK
2010	980.000,00
2011	1.050.000,00
2012	1.201.500,00
2013	1.379.000,00
2014	1.560.000,00
2015	1.700.000,00
2016	1.895.500,00
2017	2.051.875,75

2. Permasalahan Utama

a. Bidang Sosial

Dalam menjalankan Program dan Kegiatan tentu saja terdapat masalah-masalah yang dihadapi dalam menjalankan Program dan Kegiatan tersebut terutama dalam hal pemberian bantuan kepada masyarakat belumlah dapat terakomodasi secara keseluruhan sehingga Program dan Kegiatan tersebut pada Tahun 2016 dapat dilanjutkan.

b. Bidang Ketenagakerjaan

Dalam mempersiapkan Tenaga Kerja yang terampil dan kompeten kami berusaha melaksanakan Pelatihan-pelatihan agar para pekerja mampu bersaing apabila mereka nantinya bekerja ataupun berwira usaha, namun kendala yang dihadapi, masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai, begitu juga tenaga pengajar yang berkompeten di bidangnya sama sekali tidak ada, ini bisa menjadi perhatian karena untuk menciptakan Tenaga Kerja yang terampil tentu saja diperlukan juga sarana pelatihan dan Pengajar yang baik, Dalam hal Pengawasan dan Penyelesaian masalah-masalah Ketenagakerjaan kami menghadapi masalah dalam hal keberanian Pekerja mengatakan berapa upah yang diterimanya. Dalam hal penyelesaian masalah-masalah yang terjadi antara Pengusaha dan Pekerja kami berusaha menyelesaikannya secara mediasi dengan melibatkan LKS Bipartit di Perusahaan dan LKS Tripartit.

G. SISTEMATIKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai atas Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2016. Pencapaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara Indikator Kinerja Utama dengan Sasaran yang telah ditetapkan yang sudah direview sesuai dengan kebijakan yang ada.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab ini disajikan penjelasan umum SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai Tahun Anggaran 2016

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja.

Bab IV : Penutup.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu